

**TERBENGKALAINYA PENGELOLAAN
OBJEK WISATA TAPIAN PUTI
DI KECAMATAN LUBUK ALUNG
PASCA PEMEKARAN NAGARI**



**TERBENGKALAINYA PENGELOLAAN
OBJEK WISATA TAPIAN PUTI
DI KECAMATAN LUBUK ALUNG
PASCA PEMEKARAN NAGARI**



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya tulis yang dibuat sendiri, kecuali penulis mendapatkan bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 01 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



iii

iii

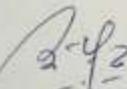
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Isnain Putra Defnur
Nomor Buku Pokok : 2010813010
Judul Penelitian : Terbengkalainya Pengelolaan Objek Wisata
Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung Pasca
Pemekaran Nagari

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh ketua
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Pembimbing I

Tgl: 2 - 3 - 2024


Dr. Bob Alfandi, M. Si
NIP. 196610311997021001

Mengetahui
Ketua Departemen Sosiologi

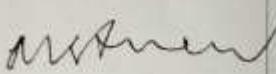
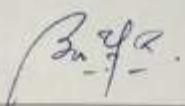
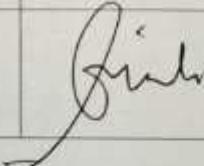

Dr. Indraddin, M. Si
NIP. 196711301999031001

iv

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujiang Skripsi Departemen Sosiologi pada tanggal 17 Juli 2024, bertempat di Ruang Sidang Departemen Sosiologi, dengan tim penguji:

TIM PENGUJI	STATUS	TANDA TANGAN
Drs. Alfitri, MS	Ketua	
Dr. Bob Alfandi, M. Si	Sekretaris	
Dr. Indraddin, M. Si	Anggota	
Dr. Alfian Miko, M. Si	Anggota	

ISNAIN PUTRA DEFNUR, 2010813010. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi: Terbengkalainya Pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung Pasca Pemekaran Nagari. Pembimbing Dr. Bob Alfiandi, M. Si.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terbengkalainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, pasca pemekaran Nagari. Fokus utama adalah mengungkap proses pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung serta dampaknya terhadap terbengkalainya objek wisata tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan informan pelaku dan pengamat terkait.

Temuan mengungkapkan bahwa pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung terjadi dalam dua tahap, yakni 2011 dan 2016, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, proses pemekaran tidak diiringi dengan penjelasan batas wilayah yang jelas, terutama di kawasan objek wisata Tapian Puti. Akibatnya, timbul konflik kepemilikan tanah antara Nagari Lubuk Alung, Sikabu, dan Salibutan yang saling mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat di objek wisata tersebut. Peran ninik mamak sebagai pengatur tanah ulayat menjadi penyebab utama konflik. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dan investor swasta mengucurkan dana pengembangan objek wisata Tapian Puti.

Teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan untuk menganalisis fenomena ini, menekankan pentingnya perubahan struktural, distribusi kekuasaan yang lebih merata, serta negosiasi dan konsensus untuk mengatasi konflik. Penelitian ini merekomendasikan kepada pihak pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk mempertegas batas-batas wilayah sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman yang terkoordinat dengan jelas dalam peta batas-batas wilayah yang sah dan menyeluruh termasuk pada wilayah objek wisata supaya jelas kepemilikannya dan tidak terjadi lagi konflik didalam pengelolaan suatu objek wisata. Setelah batas wilayah jelas, untuk dapat mencapai kesepakatan dan konsensus dalam pengelolaan objek wisata juga harus memperhatikan aspirasi semua pihak, termasuk ninik mamak, agar dalam pengelolaan dan pembangunan di suatu objek wisata dapat berjalan dengan lancar.

Kata Kunci: Pengelolaan Objek Wisata, Konflik Batas Wilayah dan Pemekaran Nagari

ISNAIN PUTRA DEFNUR, 2010813010. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang. Thesis Title: The Neglected Management of the Tapian Puti Tourist Attraction in Lubuk Alung District After the Expansion of Nagari. Supervisor Dr. Bob Alfiandi, M. Si.

ABSTRACT

This research examines the neglected management of Tapian Puti tourist attraction in Lubuk Alung District, Padang Pariaman Regency, after Nagari expansion. The main focus is to reveal the process of Nagari expansion in Lubuk Alung District and its impact on the abandonment of the tourist attraction. Through a qualitative approach and descriptive research type, data were collected from in-depth interviews with relevant actors and observers.

The findings reveal that the expansion of Nagari in Lubuk Alung District occurred in two stages, namely 2011 and 2016, with the aim of improving community welfare. However, the expansion process was not accompanied by a clear explanation of territorial boundaries, especially in the Tapian Puti tourist attraction area. As a result, a land ownership conflict arose between Nagari Lubuk Alung, Sikabu, and Salibutan, who each claimed to be the owner of the customary land at this tourist attraction. The role of ninik mamak as administrators of communal land is the main cause of conflict. This condition makes it difficult for the government and private investors to disburse funds for developing the Tapian Puti tourist attraction.

Ralf Dahrendorf's conflict theory is used to analyze this phenomenon, emphasizing the importance of structural change, a more even distribution of power, and negotiation and consensus to resolve conflict. This research recommends to the regional government of Padang Pariaman Regency to emphasize regional boundaries in accordance with the Regional Regulation of Padang Pariaman Regency which is clearly coordinated in a legal and comprehensive regional boundaries map, including tourist attraction areas so that ownership is clear and there are no further conflicts within management of a tourist attraction. Once the territorial boundaries are clear, to be able to reach agreement and consensus in managing a tourist attraction, you must also pay attention to the aspirations of all parties, including ninik mamak, so that the management and development of a tourist attraction can run smoothly.

Keywords: Tourism Object Management, Boundary Conflict and Nagari Expansion